

ABSTRAK

Bank Perekonomian Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang harus senantiasa sesuai dengan nilai prinsip islam, oleh karena itu perlu diawasi operasional dari bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam bagaimana implementasi *sharia compliance* dalam pengakuan akad, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BPRS LTB Cabang Surabaya. Indikator *sharia compliance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan akad dan kepatuhan akuntansi, dengan menggunakan PSAK 402 tentang Murabahah dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan cara data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi data sekunder, dan dilakukannya triangulasi teknik serta triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya telah memenuhi prinsip *sharia compliance* dalam implementasinya, baik dari proses pengakuan akad, penyajian dan juga pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah. *Sharia compliance* tercermin dari temuan didasarkan pada fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan murabahah. Dari segi akuntansinya, BPRS tersebut juga telah menerapkan seperti apa yang ditentukan dalam PSAK 402. Sedangkan dari segi akadnya, BPRS ini perlu memperkuat aturan terkait wakalah dan kepemilikan aset agar tidak terjadi kekeliruan. Temuan dari penelitian ini yaitu masih menghadapi tantangan pada aspek dokumentasi kepemilikan barang dan pemisahan akad wakalah–murabahah yang berpotensi menimbulkan risiko.

Kata kunci: *Sharia Compliance*, Murabahah, BPRS, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) is a sharia financial institution that must consistently adhere to Islamic principles. Therefore, its operations require operational oversight. This study aims to gain a deeper understanding of how sharia compliance is implemented in the recognition, presentation, and accounting disclosure of murabahah financing contracts at BPRS LTB, Surabaya Branch. The sharia compliance indicators used in this study are contract compliance and accounting compliance, using PSAK 402 on Murabahah and Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah and Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 on Murabahah Sale and Purchase Contracts. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews and secondary data documentation, along with technical and source triangulation.

The research results indicate that BPRS Lantabur Tebuireng, Surabaya Branch, has met sharia compliance principles in its implementation, including in the recognition process, presentation, and accounting disclosure of murabahah financing. Sharia compliance is reflected in findings based on the DSN MUI fatwa relating to murabahah. In terms of accounting, the BPRS has also implemented what is stipulated in PSAK 402. In terms of its contracts, the BPRS needs to strengthen regulations regarding wakalah (Islamic trust) and asset ownership to avoid errors. This research found that there are still challenges in documenting ownership of goods and separating wakalah and murabahah contracts, which can potentially pose risks.

Keywords: *Sharia Compliance, Murabahah, BPRS, DSN MUI Fatwa.*